



REFORMASI BIROKRASI BERBASIS KEARIFAN LOKAL: MODEL BUDAYA BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH YANG MENGADOPSI NILAI LOKAL DI PROVINSI LAMPUNG

(Hibah Penelitian Strategis Nasional Institusi)

Yulianto (NIDN: 0004076104) dan Syamsul Maarif (NIDN: 0010127210)

Jurusan Administrasi Negara, Universitas Lampung
Jalan Sumantri Brojonegoro No 1 Gedung Meneng, Bandar Lampung, Lampung- Indonesia
Email: yulianto@fisip.unila.ac.id



Abstrak

This study reviewed the bureaucratic reform model that can be built by adopting local values in Lampung Province. This value is derived from the principle Piil Pesenggiri of principles several principles, including Bejuluk Adek (Principles of Success), Nemui Nyimah (Choice Principles), Nengah Nyappur (Principle of Equality), Sakai Sambaiyan (Principles of Cooperation). Adoption Model of local values in the reform of local government bureaucracy were identified to do is conciliative approach. The approach was chosen because it provides direction change for the better effectiveness, as well as their patterns of formal legal peacefully adopted to minimize conflicts that can frustrate change in culture and customs bureaucracy.

Kata Kunci: Reforms, Local Values, Local Wisdom.

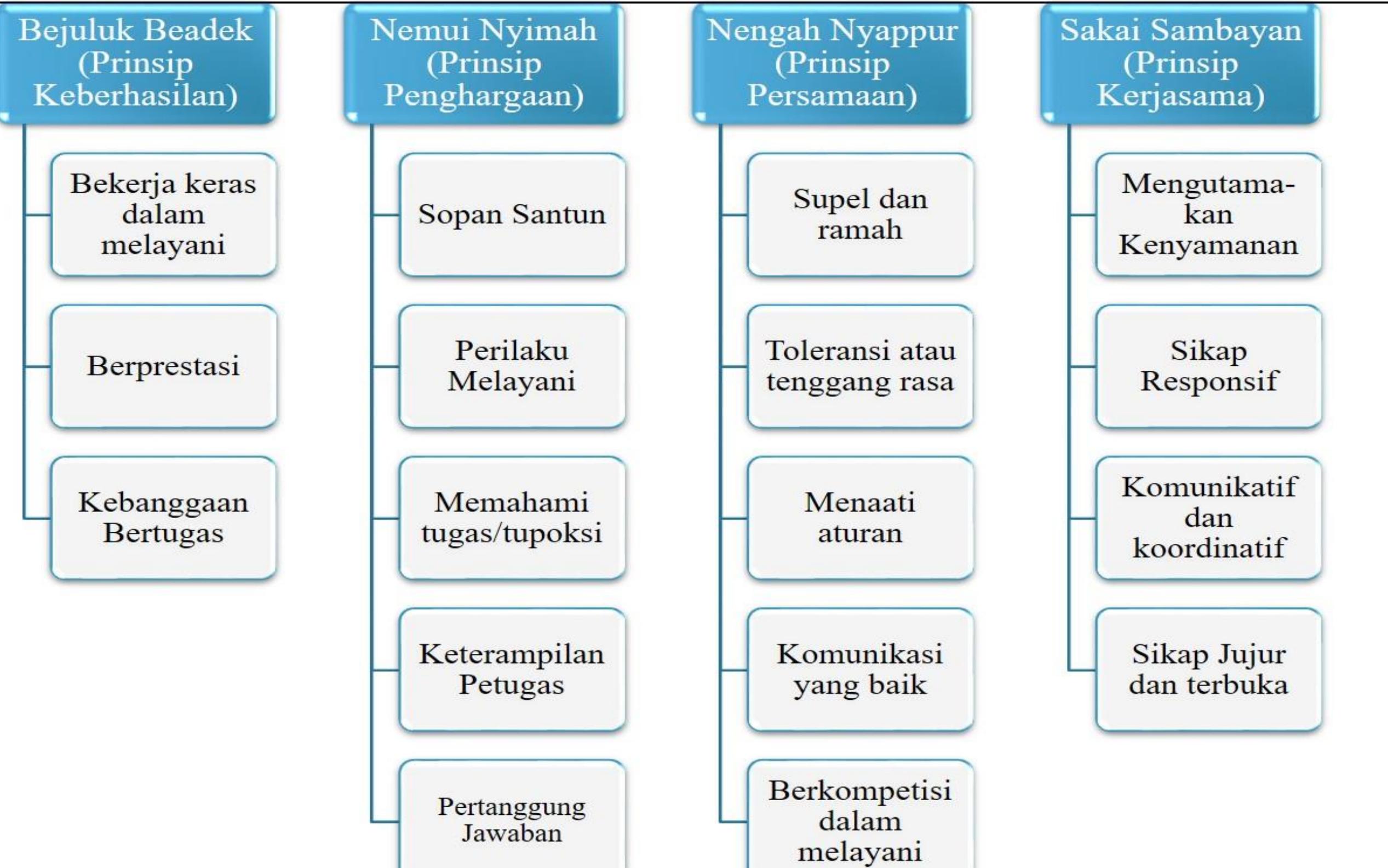
Pendahuluan

- Aspek sosial budaya dalam birokrasi maupun yang melingkupi birokrasi turut serta berperan mempengaruhi proses reformasi birokrasi.
- Kegagalan penerapan sistem-sistem barat yang diadopsi negara berkembang disebabkan oleh tidak sinkron atau kurang memperhatikan aspek sosial budaya (Kartiwa, 2005).
- Budaya birokrasi tersebut juga terkadang diwarnai oleh kearifan lokal yang ada di suatu daerah. Oleh karena itu solusi reformasi budaya birokrasi memiliki potensi untuk bersumber dari kearifan lokal yang terdapat pada suatu daerah.
- Nilai-nilai lokal yang bermuatan prinsip kehidupan selama rentang waktu yang lama diharapkan dapat menjadi elemen pelekatan perubahan perilaku dalam reformasi birokrasi di Indonesia.

Metode Riset

Penelitian ini melakukan pengumpulan data melalui tiga cara: studi pustaka, wawancara dengan para informan, FGD dan dokumentasi lapangan. Selain itu, pengumpulan data sekunder, diantaranya identifikasi model reformasi birokrasi, juga analisis beberapa model best practices yang sudah dirumuskan, dikembangkan atau diterapkan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan model analisis interaktif Miles dan Huberman (1992) dengan prosedur kerja reduksi data, penyajian data, verifikasi data dan penarikan simpulan.

Identifikasi Nilai-nilai Birokrasi yang Diadopsi Dari Nilai Budaya Lampung



Model Adopsi Nilai-Nilai Lokal Dalam Rangka Reformasi Birokrasi di Prov. Lampung



Hasil

- Dalam model adopsi nilai-nilai lokal dalam reformasi birokrasi pemerintah daerah diterapkan melalui pendekatan jalan damai (*conciliative approach*). Pendekatan tersebut dipilih karena lebih efektif, serta meminimalisir pertentangan yang dapat menggagalkan perubahan budaya dan kebiasaan birokrasi.
- Uji coba Model kepada Bagian Organisasi Pemprov Lampung dan Kec. Buay Bahuga berkesimpulan bahwa konfigurasi komponen model dan strategi penerapan model dapat meningkatkan efektivitas penerapan model reformasi birokrasi berbasis nilai lokal bagi para aparatur.
- Evaluasi model dan strategi implementasi model diarahkan kepada penguatan kondisi lingkungan organisasi pemerintah daerah melalui program reorganisasi dan rekulturisasi, serta prakondisi latar belakang personal aparatur sebagai faktor eksternal yang bersinggungan dengan model tersebut.

Penerimaan Model

Indikator	Pra-Test	Post-Test
Peran Aparatur dalam Reformasi Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> Merasa tidak memiliki kemampuan atau peran positif dalam diri Tertutup dan hanya ikuti aturan 	<ul style="list-style-type: none"> Mampu menemukan hal-hal positif, termasuk sikap, minat, bakat, atau kemampuan, Mampu memahami bahwa setiap aparatur harus memiliki kelebihan dan kelemahan dalam menerima aturan reformasi birokrasi, Menjadi lebih percaya diri dan percaya diri tentang kontribusi Anda sendiri terhadap birokrasi upaya reformasi
Kepentingan Terhadap Reformasi Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> Merasa sebagai aparat yang tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan. Merasa tidak memiliki minat yang kuat dalam reformasi birokrasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Memahami masalah birokrasi yang memahami pentingnya memfokuskan masa depan, Dapat memahami bahwa reformasi birokrasi adalah penting, karena melibatkan mereka sendiri, Memahami pentingnya adopsi kearifan lokal dalam model reformasi birokrasi, mengingat nilai-nilai yang dimilikinya tidak baru sama sekali tetapi tertanam dalam kehidupan mereka.
Komitmen terhadap Implementasi Model Reformasi Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> Beberapa memiliki cita-cita masa depan tetapi masih abstrak, sementara beberapa lainnya sama sekali tidak tahu cita-cita reformasi birokrasi dan bahkan cenderung pesimistik. Tidak memiliki rencana bagaimana bergerak untuk membuat perubahan dari reformasi birokrasi berdasarkan kearifan lokal. 	<ul style="list-style-type: none"> Mampu menekankan cita-cita masa depan berdasarkan model reformasi birokrasi yang mereka anggap realistik dan tidak berbahaya, Mampu mempersiapkan dan siap melaksanakan rencana dan langkah untuk mewujudkan tujuan tersebut, Mampu menyatakan perubahan perilaku yang siap sebagai suatu bentuk model reformasi birokrasi yang dapat membuat institusi dan lingkungan kerja menjadi lebih baik.

Kesimpulan

- Model Reformasi Birokrasi dapat dibangun dengan mengadopsi Prinsip Piil Pesenggiri yang diantaranya Bejuluk adek (Prinsip Keberhasilan), Nemui Nyimah (Prinsip Penghargaan), Nengah Nyappur (Prinsip Persamaan), Sakai Sambaiyan (Prinsip Kerjasama)..
- Hasil dari pengujian model kepada para ASN diketahui jika model tersebut mampu secara efektif diterima dan berkeyakinan mampu mendorong reformasi birokrasi. Begitu pula strategi implementasi modelnya.
- Implikasi penerapan model ini terhadap reformasi birokrasi di pemerintah daerah adalah dapat mendorong perubahan sikap secara sukarela, namun jika setengah-setengah akan menciptakan kepura-puraan saja.

Terima Kasih disampaikan kepada Kemenristekdikti, LPPM Unila dan segenap pihak yang telah membantu penyelesaian penelitian ini selama periode penelitian dilaksanakan.

Referensi

- Bate, Paul. 1997. *Strategies for Cultural Change*. Acta Sociologica, Vol. 40, No. 1 (1997), pp. 92-95
- Frederickson, George. 1997. *The Spirit of Public Administration*. Jossey-Bass Publisher.San Fransisco.
- Irianto, Sulistyowati dan Margaretha, Risma. *Piil Pesenggiri: Modal Budaya dan Strategi Identitas Ulun Lampung*. Jurnal Makara, Sosial Humaniora, Vol. 15, No. 2, Desember 2011.
- Kartiwa, Asep. 2005. Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Baik (Good Local Governance) : Orasi Ilmiah, Disampaikan pada Acara Wisuda Mahasiswa STISIP Widyalupi Mandiri, pada tanggal 4 Agustus 2005 bertempat di Gedung Anton Soedjarwo Secapa POLRI Sukabumi.
- Sofyan, Riski. 2006. Budaya Piil Pesenggiri dan efektivitas organisasi :: Studi kasus di BKD Kabupaten Lampung Utara. Thesis. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.